



Fadli Zon dan Politik Identitas dalam Pernyataan Kontroversial tentang Tragedi Pemerkosaan Massal Mei 1998

Artyson Firman Poyoh^{1*}, Emha Rifaq Alhaqi², M. Rayhan Nova Ramadhan³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*Penulis Korespondensi: denyespart4@gmail.com

Abstract Minister of Culture Fadli Zon's controversial statement, casting doubt on the existence of mass rape in the May 1998 Tragedy, sparked a strong public reaction, particularly from victims and human rights activists. This study aims to analyze Fadli Zon's statement as a form of identity politics in the context of contemporary Indonesian politics. This research uses a descriptive qualitative method with a discourse analysis approach to public statements, media coverage, and official documents such as reports from the National Commission on Violence Against Women and the Joint Fact-Finding Team (TGPF). The results show that Fadli Zon's statement is not merely a personal view, but rather a representation of identity politics that has the potential to obscure historical truth and reinforce social polarization. The identity politics that emerged in this discourse demonstrates how political power can influence the construction of national history and marginalize minority groups, particularly Chinese women victims of sexual violence. This study emphasizes the importance of historical honesty and the moral responsibility of political elites in preserving the nation's collective memory.

Keywords: Fadli Zon; Identity Politics; May 1998 Tragedy; Political History; Sexual Violence.

Abstrak Pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang meragukan keberadaan pemerkosaan massal dalam Tragedi Mei 1998 menimbulkan reaksi keras dari publik, terutama korban dan aktivis hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernyataan Fadli Zon sebagai bentuk praktik politik identitas dalam konteks politik Indonesia kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis wacana terhadap pernyataan publik, liputan media, dan dokumen resmi seperti laporan Komnas Perempuan dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernyataan Fadli Zon tidak sekadar pandangan pribadi, melainkan representasi politik identitas yang berpotensi menutupi kebenaran sejarah dan memperkuat polarisasi sosial. Politik identitas yang muncul dalam wacana tersebut memperlihatkan bagaimana kekuasaan politik dapat memengaruhi konstruksi sejarah nasional dan memarginalisasi kelompok minoritas, khususnya perempuan Tionghoa korban kekerasan seksual. Penelitian ini menegaskan pentingnya kejujuran sejarah dan tanggung jawab moral elit politik dalam menjaga memori kolektif bangsa.

Kata kunci: Fadli Zon; Kekerasan Seksual; Politik Identitas; Sejarah Politik; Tragedi Mei 1998.

1. PENDAHULUAN

Tragedi Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia. Di tengah krisis ekonomi dan sosial yang mengguncang, terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan seksual sistematis terhadap perempuan Tionghoa. Lebih dari dua dekade kemudian, luka sosial tersebut belum sepenuhnya pulih. Kontroversi kembali mencuat ketika Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, dalam perdebatan publik yang disiarkan oleh kanal IDN Times (2025), menyatakan bahwa pemerkosaan massal pada Mei 1998 “masih berupa rumor dan membutuhkan bukti akurat sebelum dapat diakui sepenuhnya”. Pernyataan tersebut memicu kritik luas karena dianggap menihilkan pengalaman korban dan berpotensi mengaburkan fakta sejarah. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan: bagaimana pernyataan Fadli Zon dapat dipahami sebagai praktik

politik identitas yang berimplikasi pada konstruksi memori sejarah dan relasi kekuasaan di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pernyataan tersebut melalui perspektif politik identitas, dengan meninjau bagaimana wacana elite politik dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap peristiwa sejarah dan memperkuat polarisasi sosial.

Secara historis, peristiwa Mei 1998 tidak hanya menjadi catatan tragedi kemanusiaan, tetapi juga simbol perubahan politik yang menandai runtuhnya rezim Orde Baru. Dalam masa transisi tersebut, kekerasan yang terjadi memiliki dimensi politik dan sosial yang kompleks. Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF, 1999) menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan Tionghoa dilakukan secara sistematis dengan tujuan menebar ketakutan dan mengacaukan stabilitas sosial. Sementara Komnas Perempuan (2024) menegaskan bahwa kasus-kasus pemerkosaan tersebut tidak dapat dipisahkan dari konteks diskriminasi etnis yang telah berlangsung lama terhadap warga keturunan Tionghoa di Indonesia. Oleh karena itu, ketika seorang pejabat negara seperti Fadli Zon meragukan keberadaan peristiwa tersebut, hal itu tidak dapat dipandang sekadar sebagai opini pribadi, melainkan memiliki implikasi sosial-politik yang luas terhadap pemaknaan sejarah bangsa

Fenomena ini menunjukkan bagaimana kekuasaan berperan dalam menentukan versi kebenaran yang diterima publik. Seperti dijelaskan oleh Foucault (1980), hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan selalu saling mengonstruksi; pihak yang memiliki otoritas politik sering kali pula menjadi pihak yang mengatur narasi sejarah. Pernyataan Fadli Zon mencerminkan praktik kekuasaan simbolik yang mengarahkan publik pada keraguan terhadap fakta yang sudah terverifikasi. Dalam konteks ini, politik identitas berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan elit politik untuk membentuk batas antara “kami” dan “mereka”, antara pihak yang dianggap penjaga kebenaran dan pihak yang dianggap pengganggu stabilitas nasional. Pandangan ini sejalan dengan teori identitas sosial Tajfel & Turner (1979) yang menjelaskan bahwa identitas kelompok dibangun melalui perbandingan sosial dan pembedaan terhadap kelompok lain.

Selain itu, konteks politik kontemporer Indonesia turut memperkuat dinamika politik identitas. Dalam beberapa tahun terakhir, wacana publik kerap didominasi oleh isu-isu berbasis identitas seperti etnis, agama, dan ideologi politik. Tokoh-tokoh seperti Fadli Zon sering kali memanfaatkan posisi mereka untuk mengartikulasikan narasi politik yang beresonansi dengan kelompok pendukungnya. Hal ini bukan sekadar strategi komunikasi, tetapi juga bentuk reproduksi simbolik yang menjaga loyalitas politik melalui konstruksi makna sejarah. Sebagaimana dijelaskan oleh Huddy (2001), politik identitas berfungsi untuk menciptakan solidaritas internal kelompok sekaligus membingkai isu politik dalam perspektif yang

menguntungkan kelompok tersebut Lebih jauh, pernyataan Fadli Zon juga memperlihatkan bagaimana memori kolektif bangsa dapat dipolitisasi. Menurut Halbwachs (1992), memori kolektif tidak pernah netral; ia selalu dibentuk oleh konteks sosial dan kekuasaan yang mengelilinginya. Dalam kasus ini, penyangkalan terhadap kekerasan seksual Mei 1998 dapat dipahami sebagai upaya pembungkian ulang terhadap masa lalu nasional, di mana penderitaan kelompok minoritas dihapus dari narasi resmi negara. Upaya semacam ini berbahaya karena dapat menormalisasi ketidakadilan dan memperpanjang trauma sosial yang dialami korban. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti dinamika politik identitas, tetapi juga menegaskan pentingnya tanggung jawab moral elit politik dalam menjaga integritas sejarah bangsa.

Melalui analisis wacana terhadap pernyataan publik, liputan media, dan dokumen resmi seperti laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Komnas Perempuan, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana kekuasaan politik bekerja melalui bahasa dan narasi. Analisis wacana kritis memandang bahasa tidak bersifat netral, melainkan menjadi medium utama dalam membentuk, mempertahankan, dan melegitimasi relasi kekuasaan dalam konteks sosial-politik tertentu (Fairclough, 1995; van Dijk, 2008). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat hubungan antara struktur kekuasaan dan konstruksi makna sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya dalam arena politik pascareformasi di Indonesia (Eriyanto, 2001). Dalam konteks politik identitas, wacana publik sering kali digunakan untuk membangun batas “kami” dan “mereka” yang berimplikasi pada eksklusi sosial dan penguatan dominasi simbolik (Mudde, 2004; Wodak, 2015). Dengan memahami praktik politik identitas dalam kasus Fadli Zon, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu politik dan komunikasi politik, terutama dalam memahami bagaimana wacana publik berfungsi sebagai sarana reproduksi kekuasaan dan pengetahuan di Indonesia pascareformasi (Foucault, 1980).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang membawa penelitian untuk mengeksplorasi atau menangkap situasi social yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J.Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif juga berfokus pada fenomena social, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. dengan pendekatan

analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis). Data dikumpulkan dari sumber primer berupa pernyataan Fadli Zon dalam video IDN Times Real Talk (2025), serta sumber sekunder seperti laporan Komnas Perempuan (2024), Laporan Akhir Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 1998, dan artikel dari Perempuan Mahardhika (2024). Analisis dilakukan dengan menafsirkan makna di balik wacana Fadli Zon serta menghubungkannya dengan konteks politik identitas, relasi kekuasaan, dan memori sejarah nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memahami pernyataan Fadli Zon dalam konteks politik identitas, penelitian ini menggunakan landasan teori Social Identity Theory (Tajfel & Turner, 1979) yang menjelaskan bahwa individu atau kelompok membentuk identitas sosial dengan membedakan diri dari kelompok lain. Dalam konteks politik Indonesia, identitas sering dimobilisasi untuk memperkuat posisi kekuasaan. Huddy (2001) menegaskan bahwa politik identitas berfungsi sebagai alat pembingkai wacana (framing) yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu politik tertentu.

Menurut Foucault (1980), kekuasaan dan pengetahuan saling terkait melalui wacana, di mana siapa yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan kebenaran juga menguasai cara pandang publik. Pernyataan Fadli Zon bahwa tragedi pemerkosaan massal Mei 1998 “masih berupa rumor” memperlihatkan bagaimana kekuasaan simbolik digunakan untuk membentuk ulang realitas sejarah. Hal ini menunjukkan bentuk kontrol naratif yang berbahaya karena berpotensi menormalisasi penyangkalan terhadap kekerasan berbasis gender dan etnis.

Laporan TGPF (1999) dan Komnas Perempuan (2024) dengan jelas menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa terjadi secara sistematis selama kerusuhan Mei 1998. Tindakan tersebut tidak hanya merupakan kejahatan berbasis gender, tetapi juga mengandung dimensi politik yang bertujuan menciptakan teror dan mempermalukan kelompok etnis tertentu. Halbwachs (1992) menekankan bahwa memori kolektif suatu bangsa dapat dibentuk atau dihapus oleh kekuasaan. Dengan demikian, pernyataan Fadli Zon dapat dipahami sebagai upaya untuk membingkai ulang memori kolektif bangsa Indonesia.

Dari perspektif politik identitas, pernyataan tersebut berfungsi untuk menguatkan identitas kelompok dominan dan melemahkan posisi minoritas. Dalam hal ini, korban perempuan Tionghoa menjadi simbol dari kelompok yang diabaikan dalam narasi nasional. Dengan meragukan fakta yang telah didokumentasikan secara resmi, Fadli Zon secara tidak langsung memperkuat posisi politik tertentu dengan cara meniadakan penderitaan kelompok lain.

Implikasi dari wacana ini sangat luas. Sebagai Menteri Kebudayaan, Fadli Zon memiliki otoritas dalam menentukan arah kebijakan sejarah dan pendidikan. Pernyataannya berpotensi memengaruhi representasi peristiwa Mei 1998 dalam buku pelajaran dan memori kolektif generasi muda. Jika narasi penyangkalan ini terus berlanjut, maka kebenaran sejarah bisa terdistorsi dan proses rekonsiliasi nasional akan semakin sulit tercapai.

4. KESIMPULAN

Pernyataan Fadli Zon mengenai pemerkosaan massal Mei 1998 menunjukkan bagaimana politik identitas bekerja melalui wacana publik. Dengan memanfaatkan posisi dan kekuasaan simboliknya, Fadli Zon berusaha membingkai ulang tragedi kemanusiaan tersebut sesuai kepentingan politik tertentu. Penelitian ini menegaskan bahwa wacana penyangkalan semacam itu bukan hanya persoalan opini pribadi, tetapi bagian dari praktik kekuasaan yang mempengaruhi memori kolektif bangsa. Oleh karena itu, penting bagi pejabat publik untuk menjaga integritas moral dan tanggung jawab historis dalam mengakui serta melindungi kebenaran sejarah bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Cakrawikara Indonesia. (2022, May 23). *Mengingat kembali perkosaan Mei 1998: Luka yang tidak pernah sembuh*. <https://cakrawikara.id/publikasi/artikel/mengingat-kembali-perkosaan-mei-1998-luka-yang-tidak-pernah-sembuah/>
- Eriyanto. (2001). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. LKiS.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977* (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.
- Halbwachs, M. (1992). *On collective memory*. University of Chicago Press.
- Kartiko, A. (2025). *Intelijen keamanan dan politik identitas: Mengawal demokrasi (Strategi intelligence-led policing pada Pemilu 2014 dan 2019)*. USK Press.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024, May 22). *Siaran pers Komnas Perempuan: Merespons penyangkalan peristiwa kekerasan seksual Mei 1998*. <https://komnasperempuan.go.id>
- Krisadhi, R. (2025). Representasi sosial pada politik identitas dalam kampanye pemilihan presiden Indonesia: Analisis sentimen dan topik. *Jurnal Pustaka Dianmas*, 5(1), 65–85.
- Mudde, C. (2004). The populist zeitgeist. *Government and Opposition*, 39(4), 541–563. <https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x>
- Perempuan Mahardhika. (2024, May 20). *Tragedi perkosaan massal 13–15 Mei 1998*. <https://mahardhika.org/tragedi-perkosaan-massal-13-15-mei-1998>

- Saleh, Z. (2021). *Pengembangan potensi diri anak melalui program kegiatan islami Majelis Anak Shaleh Kota Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Siregar, M. (2021). Kritik terhadap teori kekuasaan-pengetahuan Foucault. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1). <https://doi.org/10.30742/juispol.v1i1.1560>
- Tim Gabungan Pencari Fakta. (1999). *Laporan akhir peristiwa kerusuhan Mei 1998*. Pemerintah Republik Indonesia.
- van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and power*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-1-137-07299-3>
- Wodak, R. (2015). *The politics of fear: What right-wing populist discourses mean*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781446270073>
- YouTube. (2025, June 10). *Real Talk: Debat panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis soal revisi buku sejarah* [Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=H1gYkKIZjKU>